

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2019 antara lain karena adanya:
  - a. Pelampauan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelampauan Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang sah.
  - b. Penghematan Belanja Daerah yang disebabkan oleh penghematan belanja pegawai karena adanya jabatan yang tidak terisi, kematian, mutasi pegawai, terlambatnya proses pencairan tambahan penghasilan guru, tidak terpakainya anggaran belanja pegawai untuk pengangkatan CPNS, dan tidak terbayarnya sebagian tunjangan profesi guru. Selain itu disebabkan juga oleh serapan anggaran belanja tidak terduga yang sangat rendah serta penghematan belanja modal yang terjadi karena tidak terbayarnya beberapa kegiatan yang didanai oleh DAK akibat adanya keterlambatan transfer dana dari Pemerintah Pusat.
  - c. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
  - d. Sisa Dana Kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu yang belum selesai atau bahkan belum sama sekali dilaksanakan .

2. Perlakuan Akuntansi untuk SiLPA Kabupaten Belu yang terjadi selama tahun anggaran 2017-2019 dari segi pengakuan, pencatatan, penyajian dan pengungkapan secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Lampiran II. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam segi pencatatan koreksi kesalahan pembukuan.

## **6.2 Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Belu perlu melakukan perencanaan dengan lebih cermat dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya menetapkan target pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dapat dicapai, serta merencanakan belanja sebaik mungkin sehingga dapat terserap dengan maksimal.
2. Kepala Daerah perlu melakukan pengendalian internal untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari APBD.
3. Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu perlu meningkatkan kinerja dalam mengelola sisa anggaran untuk dialokasikan pada program/kegiatan yang belum dilaksanakan serta lebih disiplin waktu dalam penyetoran kembali uang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Asmara. 2013. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX 23-26 Agustus di Padang.*
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4).* Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hardiana, Afida. 2018. *Pengaruh Perubahan Pendapatan, Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Perubahan Pembiayaan Terhadap SILPA (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tahun 2016):*Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Izudin, Syaparudin dan Syamsuddin. *Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan dengan SiLPA Di Kabupaten Bungo:*Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1, No. 1, juli 2013.
- Iswari, Nisa Nur. 2018. *Pengaruh Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tahun 2016):*Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kusnandar, D. Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal:*Jurnal Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martunis, Dawarnis, Syukriy Abdullah. *Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh:*Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, Vol. 7, No. 1 Januari 2014, Hlm. 52-57.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pradipta, Vanesha Sonya. 2011. *Analisis Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan APBD Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan*: Skripsi Universitas Airlangga.

Sari, Selvia Nurindah. 2018. *Evaluasi Penyebab Sisa Lebih Perhiungan Anggaran*:Tesis Universitas Gadjah Mada.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.